

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, yang mana daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan fungsinya.

Musgrave dalam Guritno (2000:2) menyebutkan bahwa pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Dalam menjalankan fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, Pemerintah Pusat mengambil peran penuh. Sedangkan fungsi alokasi lebih dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah.

Untuk menjalankan fungsinya, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan daerah. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Paragraf kedua pasal 157 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah tersebut terdiri atas:

A. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah;

B. Dana perimbangan; dan

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah secara spesifik telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagian kedelapan, pasal 37 sampai pasal 41 mengatur lebih spesifik mengenai Pajak Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Untuk Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan Wajib Pajak

Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarifnya Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengkaikan tariff dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Restoran yang terutang harus dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Bab IV yang mengatur secara khusus mengenai Pajak Restoran menyebutkan dalam pasal 10 ayat (4), pelayanan yang disediakan di Restoran yang menjadi objek pajak restoran meliputi:

- A. Restoran;
- B. Rumah makan;
- C. Kafetaria;
- D. Kantin;
- E. Warung;
- F. Depot;
- G. Bar;
- H. Pujasera/*Food Court*;
- I. Toko Roti/*Bakery*;
- J. Jasa boga/catering.

Pasal 10 ayat (5) menyebutkan, tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana disebutkan diatas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai

penjualannya tidak melebihi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak Daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya telah membuat terobosan cara baru dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Sekarang DPPK Surabaya telah memfasilitasi Wajib Pajak Daerah untuk bisa menyampaikan SPTPD secara elektronik (e-SPTD). E-SPTD merupakan cara baru dalam penyampaian laporan omset penjualan melalui sistem pelaporan elektronik yang akan memudahkan Wajib Pajak Daerah dalam melaporkan pajak dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Dalam penerapan e-SPTPD, DPPK Surabaya telah melakukan sosialisasi kepada 850 Wajib Pajak hotel, restoran, dan parkir pada Selasa 9 Agustus 2016 lalu. Hal ini sangat membantu Wajib Pajak Daerah dalam menerapkan e-SPTD dalam menyampaikan kewajiban perpajakan mereka. Namun bagi Wajib Pajak Daerah yang baru terdaftar masih belum mendapatkan sosialisasi yang cukup. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak Daerah baru lebih memilih menggunakan cara lama daripada menerapkan e-SPTD yang seharusnya membuat Wajib Pajak Daerah lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “Penerapan e-SPTPD Pada Pajak Restoran Depot Bakwan Ming”

1.2. Tujuan Tugas Akhir

Guna memperoleh sasaran yang akan dituju, maka penulis menetapkan tujuan tugas akhir. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini dikategorikan ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

1.2.1. Tujuan Umum

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan e-SPTD pada pajak restoran Depot Bakwan Ming mulai dari pendaftaran hingga penerapan e-SPTPD dalam memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Restoran di Depot Bakwan Ming.

1.2.2. Tujuan Khusus

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) Program Diploma III Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).

1.3. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dalam Studi Lapang adalah :

1.3.1 Bagi Perusahaan :

Dapat menghasilkan sebuah informasi dan memberikan masukan bagi pihak manajemen Depot Bakwan Ming mengenai manfaat yang diberikan dalam penerapan e-SPTD dalam menjalankan kewajiban perpajakan Pajak Restoran di Depot Bakwan Ming.

1.3.2. Bagi Penulis:

Dapat Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Restoran yang telah di ajarkan secara teori dan praktek kemudian di aplikasikan di dalam dunia kerja melalui sistem e-SPTPD.

1.3.3 Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai Referensi, informasi, tambahan dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

1.4. Ruang Lingkup Tugas Akhir

Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah Depot Bakwan Ming yang beralamatkan di Tenggilis Mejoyo AI-8 Blok G-6, dimana depot ini merupakan Wajib Pajak Daerah baru yang belum menerapkan sistem e-SPTPD dalam menjalankan kewajiban perpajakan daerahnya. Penelitian ini

dibatasi hanya pada Pajak Restoran yang timbul atau terhutang di Depot Bakwan Ming.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi lapangan yaitu pengamatan yang dilakukan penulis dilapangan dalam rangka memperoleh data – data yang diperlukan dan pendukung penulisan. Penulis menggunakan dua cara dalam metode ini, yaitu interview dan observasi. Interview adalah metode untuk memperoleh data dengan melakukan tanya jawab dengan pemilik depot dan para pegawai mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam depot tersebut, sedangkan observasi (pengamatan) adalah metode untuk memperoleh data dengan cara mengamati, meneliti dan menganalisa data yang digunakan oleh depot untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.